
Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Ekowisata di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan

M. Nahrowi

Universitas Sebelas Maret

nahrowiamin@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History: 2020-12-16

Received: 2023-01-04

Revision: 2023-01-04

Accepted: 2023-01-07

KETENTUAN SITASI

Nahrowi, M. (2022)

Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Ekowisata di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. *Geadidaktika*. Vol. 2, No. 2.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019. Kecamatan Petungkriyono merupakan salah satu kawasan di Kabupaten Pekalongan yang ditetapkan sebagai kawasan ekowisata dan hutan lindung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dengan menggunakan analisis partisipasi menurut tangga partisipasi Arstein, kemudian diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkat partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata di Kecamatan Petungkriyono terdapat 3 (tiga) tingkat partisipasi, yaitu (1) tingkat partisipasi tinggi (citizen power); (2) tingkat partisipasi sedang (tokeisme); dan tingkat partisipasi yang rendah (non-partisipasi).

Kata Kunci : tingkat partisipasi, pengembangan ekowisata

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Hal ini menjadikan pentingnya keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam sebuah pengembangan. Tujuan partisipasi masyarakat dalam pengembangan adalah diserapnya ide atau gagasan untuk meningkatkan dampak positif dari sebuah pembangunan. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat menekan dampak negatif pengembangan yang kurang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.

Menurut Setyaningsih (2015:15) partisipasi diartikan sebagai peran aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Partisipasi menjadi sebuah proses pembentukan kekuatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Partisipasi dapat dilakukan secara individual atau perorangan dan kelompok atau bersama. Dalam berpartisipasi dalam pengembangan, masyarakat memiliki beberapa tingkatan.

Partisipasi menurut Arstein (1996) dapat dikategorikan menjadi delapan tangga partisipasi. Delapan tangga partisipasi tersebut adalah manipulasi, terapi, pemberitahuan atau informasi, konsultasi, penempatan, kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan kontrol masyarakat. Delapan tangga diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkatan partisipasi, yakni (1) tingkat partisipasi tinggi (*citizen power*) meliputi tangga partisipasi kontrol masyarakat, pendelegasian kekuasaan, dan kemitraan; (2) tingkat partisipasi sedang (*tokenisme*) meliputi tangga partisipasi penempatan, penempatan, dan konsultasi; (3) tingkat partisipasi rendah (*non-participation*) meliputi tangga partisipasi terapi dan manipulasi. Tingkatan partisipasi tidak selalu sama dalam tahapan pengembangan ekowisata.

Pengembangan merupakan upaya yang dilakukan secara terencana pada suatu objek dengan harapan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pengembangan secara umum dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yakni tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pengawasan dan evaluasi. Tahapan perencanaan meliputi identifikasi potensi, ide/gagasan, keputusan pengembangan, dan perencanaan program. Tahapan pelaksanaan meliputi sosialisasi, pelaksanaan program, dan pengelolaan. Sedangkan tahapan pengawasan dan evaluasi meliputi terwujudnya pengembangan, bentuk pengawasan dan evaluasi, dan dampak pengembangan.

Ekowisata yang pada dasarnya sebuah bentuk pariwisata yang mengedepankan konservasi, edukasi, dan kesejahteraan masyarakat lokal, diperlukan konsep yang matang dalam setiap tahapan pengembangan. Menurut Damanik dan Webber (2012: 67) objek ekowisata yang dimaksudkan yaitu perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab dengan cara mengonversikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Kecamatan Petungkriyono merupakan kawasan pegunungan dengan kenampakan alam berupa hutan, gunung, sungai dan lembah sehingga berpotensi sebagai objek ekowisata. Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 Pasal 29 bahwa Kecamatan Petungkriyono adalah kawasan hutan lindung dan peruntukan ekowisata. Potensi ekowisata Kecamatan Petungkriyono perlu dikembangkan untuk meningkatkan daya tarik wisata.

Menurut Priyono (2012: 51) pengembangan ekowisata diartikan sebagai cara melaksanakan dan mengelola lingkungan alam dan mencakup dimensi-dimensi budaya dan interpretasi serta mengarah kepada usaha untuk menunjang konservasi. Pengembangan ekowisata pada penelitian ini dilakukan dengan analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, Treath*) berdasarkan prinsip-prinsip ekowisata. Prinsip-prinsip ekowisata antara lain, konservasi, partisipasi masyarakat, edukasi, ekonomi dan wisata. Penggunaan prinsip ekowisata dalam pengembangan bertujuan untuk membentuk ekowisata di Kecamatan Petungkriyono yang melestarikan lingkungan, edukasi, ekonomi masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019. Petungkriyono merupakan kawasan pegunungan dengan kenampakan alam berupa gunung, lembah, sungai, hutan, dan hewan. Keanekaragaman yang dimiliki menjadi potensi ekowisata di Kecamatan Petungkriyono. Ketinggian rata-rata Kecamatan Petungkriyono yakni 1.300 mdpl dengan didominasi belukar. Kecamatan ini memiliki luas 8.398,43 Ha yang terbagi dari sembilan wilayah administrasi desa.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer yang dikumpulkan berupa lokasi objek ekowisata dan informasi tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata. Data sekunder dalam penelitian ini yakni data monografi Kecamatan Petungkriyono, data luas dan batas Kecamatan Petungkriyono. Subjek penelitian diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling digunakan untuk memperoleh data melalui wawancara dengan pihak yang dianggap memiliki banyak informasi tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata di Kecamatan Petungkriyono. Pihak yang dimaksud yakni kepala desa, pengelola, dan pelaku usaha di objek ekowisata. Hasil wawancara kemudian dilakukan tabulasi data untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

Analisis data partisipasi dalam pengembangan ekowisata di Kecamatan Petungkriyono menggunakan analisis tangga partisipasi menurut Arstein. Tangga partisipasi Arstein berupa kontrol masyarakat, pendelegasian kekuasaan, kemitraan, penempatan, konsultasi, pemberitahuan/informasi, terapi, dan manipulasi. Delapan tangga partisipasi Arstein diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) tingkat partisipasi yakni, (1) tingkat partisipasi tinggi (*citizen power*) meliputi tangga kontrol masyarakat, pendelegasian kekuasaan, dan kemitraan; (2) tingkat partisipasi sedang (*tokenism*) meliputi penempatan, konsultasi, dan pemberitahuan/informasi; dan (3) tingkat partisipasi rendah (*non-participation*) meliputi terapi dan manipulasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Petungkriyono memiliki enam objek ekowisata yakni Black Canyon, Welo Asri, Curug Lawe, Curug Bajin, Gunung Kendalisada, dan Sigebyar. Objek ekowisata di Kecamatan Petungkriyono tersebar dalam empat desa sebagai berikut; (1) Desa Kayupuring meliputi objek ekowisata Black Canyon dan Welo Asri; (2) Desa Kasimpar yakni objek ekowisata Curug Lawe; (3) Desa Tlogopakismeliputi objek ekowisata Curug Bajin; (4) Desa Tlogohendro meliputi objek ekowisata Gunung Kendalisada dan Sigebyar.

Desa Kayupuring memiliki dua objek ekowisata yakni Black Canyon dan Welo Asri. Masyarakat Desa Kayupuring Kecamatan Petungkriyono ikut berpartisipasi dalam tahapan pengembangan ekowisata di Desa Kayupuring. Pada tahapan

perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Welo Asri dan Black Canyon partisipasi masyarakat Desa Kayupuring termasuk tangga kontrol masyarakat (*citizen control*) yang berarti perencanaan dan pelaksanaan objek ekowisata berada pada kekuasaan masyarakat. Sedangkan pada tahapan pengawasan dan evaluasi, partisipasi masyarakat termasuk tangga partisipasi kontrol masyarakat (*citizen control*) pada Welo Asri dan pendelegasian kekuasaan (*delegated power*) pada Black Canyon. Berdasarkan hasil tersebut, maka tingkat partisipasi masyarakat Desa Kayupuring dalam pengembangan ekowisata Welo Asri dan Black Canyon termasuk tingkat partisipasi tinggi (*citizen power*) dimana masyarakat memiliki kekuasaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi.

Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono memiliki objek ekowisata yang dikembangkan yakni Curug Bajing. Pengembangan objek ekowisata Curug Bajing melibatkan masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Curug Bajing meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan evaluasi. Partisipasi masyarakat Desa Tlogopakis pada semua tahapan pengembangan ekowisata termasuk tangga partisipasi kontrol masyarakat (*citizen control*) yang berarti masyarakat memiliki kekuasaan secara penuh dalam pengembangan objek ekowisata Curug Bajing. Berdasarkan hasil tersebut, maka partisipasi masyarakat Desa Tlogopakis dalam pengembangan ekowisata Curug Bajing termasuk tingkat partisipasi tinggi (*citizen power*) dimana masyarakat memegang kekuasaan dalam pengembangan ekowisata.

Desa Tlogohendro Kecamatan Petungkriyono memiliki objek ekowisata Sigebyar dan Gunung Kendalisada. Pengembangan tersebut tidak lepas dari partisipasi masyarakat Desa Tlogohendro. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Sigebyar dan Gunung Kendalisa termasuk tangga partisipasi penempatan (*placation*) yang berarti masyarakat diberikan hak untuk mengajukan saran dan memberikan kritikan dalam pengembangan, akan tetapi pemegang kekuasaan berhak menilai kelayakan masukan dari masyarakat. Partisipasi penempatan (*placation*) termasuk tingkat partisipasi sedang (*tokenism*). Tingkat partisipasi ini ditujukan dengan masyarakat dihargai dalam pengembangan dengan cara pemerian informasi, konsultasi, dan penempatan akan tetapi keputusan tetap berada di pegang kekuasaan dalam hal ini yakni Pemerintah Desa Tlogohendro.

Desa Kasimpar Kecamatan Petungkriyono memiliki objek ekowisata yakni Curug Lawe. Partisipasi masyarakat Desa Kasimpar dalam pengembangan objek ekowisata Curug Lawe terbagi menjadi tiga tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Curug Lawe termasuk tangga partisipasi manipulasi (*manipulation*). Pada tahapan pelaksanaan pengembangan, partisipasi masyarakat termasuk tangga terapi (*therapy*). Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pengembangan Curug Lawe termasuk tangga manipulasi (*manipulation*). Tangga partisipasi terapi dan manipulasi termasuk tingkat partisipasi rendah (*non-participation*) dimana masyarakat tidak memiliki ruang dalam pengambilan keputusan pengembangan. Sedangkan keputusan berada di Pemerintah Desa Kasimpar.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata di Kecamatan Petungkriyono diperoleh hasil sebagai berikut; (1) tingkat partisipasi tinggi (*citizen power*) pada objek ekowisata Curug Bajing, Welo Asri dan BlackCanyon; (2) tingkat partisipasi sedang (*tokenisme*) pada objek ekowisata Sigebyar dan Gunung Kendalisada; (2) tingkat partisipasi rendah (*non-participation*) pada objek ekowisata Curug Lawe.

D. KESIMPULAN

Tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Petungkriyono dalam pengembangan ekowisata dikategorikan menjadi tiga. Ketiga tingkat tersebut adalah tingkat partisipasi masyarakat tinggi (*citizen power*), partisipasi sedang (*tokenism*), dan partisipasi rendah (*non-participation*). Masyarakat dengan tingkat partisipasi tinggi (*citizen power*) yakni Desa Kayupuring dan Desa Tlogopakis. Sedangkan masyarakat dengan tingkat partisipasi masyarakat sedang (*tokenism*) yakni Desa Tlogohendro dan tingkat partisipasi masyarakat rendah (*non-participation*) yakni Desa Kasimpar. Perlu dilakukan peningkatan sumberdaya manusia untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata.

E. DAFTAR PUSTAKA

Damanik, J. & Webber F. H. (2006). *Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

- Damartoto, A., dkk. (2014). *Habitus Pengembangan Pariwisata Konsep dan Aplikasi*. Surakarta: UNS Press.
- Nugroho, I. (2011). *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurdiyansah. (2014). *Peluang dan Tantangan Pariwisata Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Nyoman, I. L., dkk (2014). *Pedoman Fasilitator untu Pembangunan Ekowisata*. Jakarta: LIPI Press.
- Pendit, N. S. (2002). *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Peraturan Daerah KabupatenPekalongan Nomor 2 tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.
- Pedoman Analisis Derah OperasiObyek Wisata dan Daya Tarik Wisata Alam (ADO-ODTWA) Departemen KehutananKementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tahun 2003.
- Priyono, Y. (2012). *Pengembangan Kawasan Ekowisata Bukit Tangkling Berbasis Masyarakat*. Jurnal Perspektif Arsitektur. Vol 7/ no. 1 juli 2012. (51-57).
- Setyaningsih, W. (2015). *CommunityBased Tourism*. Surakarta: UNS Press.
- Susanto, B. (2019). *Pemkab Pekalongan Ajukan Permohonan Kawasan Larang Tebang untuk Petungkriyono*. Tribun Jateng. Diakses pada 02 Juli 2019 pukul 00.45 WIB dari sumber <https://jateng.tribunnews.com/2019/02/28/pemkab-pekalongan-ajukan-permohonan-kawasan-larangan-tebang-untuk-petungkriyono>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataaan
- Wood, M. E. (2002). *Ecotorism: Principles, Practices and Policies for Sustainability*. Paris:United Nation Publising.